

FUNGSI MANAJEMEN TRANSPORTASI UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG PADA KEMACETAN DI JALAN ASIA AFRIKA

SUCI RAHMADANI S.AP

**Prodi Magister Ilmu Administrasi Dan
Kebijakan Publik Konsentrasi Kebijakan
Publik Universitas Bandung, Indonesia**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Fungsi Manajemen Pengelolaan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung pada kemacetan di Jalan Asia tentang Pengelolaan Transportasi Umum di Jalan Asia-Afrika oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang berfokus pada deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini peneliti mengambil Seksi lalulintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan sebagai informan Teori yang digunakan adalah Teori Manajemen.

Pengumpulan data dari metode yang digunakan tersebut terdiri dari observasi, studi pustaka dan wawancara mendalam. Seksi Lalulintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan sebagai informan. Teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan (observasi, dan wawancara mendalam). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi umum di jalan Asia-Afrika dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Dinas Perhubungan, Adapun pengelolaan yang dilaksanakan berupa Regulasi diantaranya manajemen rekayasa lalulintas, pemberian sarana dan prasarana lalu lintas. Walaupun pemerintah sudah

melakukan pembangunan untuk mengatasi masalah transportasi umum di jalan Asia-Afrika, Masih ada beberapa hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan transportasi umum di jalan Asia-Afrika adalah kondisi ekonomi pedagang dan tukang parkir di jalan Asia-Afrika , kondisi Sosial dan Juga Kondisi Geografis masih sulit di atasi.

Kata Kunci : Pengelolaan Manajemen,
Fungsi Manajemen

ABSTRACT

This study aims to find out how the Transportation Department Management about Management of Public Transportation at Asia-Afrika Street by the Bandung City Transportation Agency.

The method used in this research is qualitative focusing on descriptive qualitative. In this study, researchers took the Traffic and Street Transportation Section of the Transportation Department as an informant. The theory used was Management Theory.

Data collection from the method used consists of observation, literature study and in-depth interviews. Traffic and Public Transportation Section of the Transportation Department as the informant. Data collection techniques for library study and observation, and in-depth interviews.

The results of this study shows that the management of public transportation on the Asia-Africa road is carried out by several parties, such as the Department of Transportation, while the management carried out in the form of regulations includes traffic engineering management,

provision of traffic facilities and infrastructure. Although the government has carried out development to overcome the problem of public transportation at Asia-Afrika Street, there are still some obstacles faced in managing public transportation at asia-Afrika street, such as the economic condition of traders and parking attendants at asia afrika street, social conditions and conditions Geography is still difficult to overcome.

Keyword : Management, Management function

1. Pendahuluan

Kota Bandung merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Bandung merupakan kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan kepadatan mencapai 15.051 jiwa/km². Terletak 140 km di sebelah tenggara Jakarta, Bandung merupakan kota terbesar di bagian selatan pulau Jawa (Wikipedia, 2023). Dengan menyanggah status ibu kota Provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu destinasi favorit, tentunya Kota Bandung mempunyai kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi. Selain itu juga Kota Bandung dipadati oleh para pengendara yang beraktivitas sehari-harinya, seperti berangkat kerja,

berangkat sekolah, dan aktivitas lainnya. Mulai dari transportasi pribadi maupun transportasi umum. Jumlah penduduk yang bertambah mengakibatkan aktivitas masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut berdampak pada sarana transportasi yang muncul beraneka ragam dalam memenuhi kebutuhan aktivitas masyarakat. Maka dari itu, timbulah kenaikan jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat. Dari jumlah kendaraan yang kian hari kian berlimpah, kemacetan sering terjadi di berbagai ruas jalan di Kota Bandung. Kemacetan tersebut terjadi karena pertumbuhan kendaraan pribadi yang belum bisa diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur jalan yang memadai, hal ini menyebabkan jalanan di Kota Bandung yang relatif sempit menjadi semakin macet.

Di kota Bandung khususnya Jalan Asia Afrika ada banyak berbagai kendaraan memadati jalanan, sehingga pada jalan tersebut

dijuluki sebagai jantung kota Bandung. Tidak hanya pada jam-jam sibuk saja jalan ini selalu ramai dan macet, hal ini dikarenakan jalan Asia-Afrika merupakan salah satu destinasi tujuan wisata para turis maupun warga lokal dan juga sebagai pusat bisnis atau ekonomi bagi sebagian perusahaan sehingga setiap harinya jalan tersebut selalu ramai dipenuhi oleh masyarakat yang berlalu lintas.

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin tinggi, sementara kapasitas infrastruktur jalan sebagai sektor penunjang sangat terbatas, kondisi ini dapat berakibat timbulnya permasalahan transportasi yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan menimbulkan inefisiensi ekonomi dimana kerugian yang sangat besar dialami oleh pemakai jalan, terutama dalam hal

pemborosan waktu, pemborosan bahan bakar, pemborosan tenaga sehingga biaya transportasi semakin besar, hal ini pula yang akan berdampak pada kenyamanan berlalu lintas serta meningkatnya polusi udara. Berdasarkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga dapat digambarkan bahwa kondisi kendaraan yang terjadi mengalami kepadatan. Begitu juga dengan jenis kendaraan lainnya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kemacetan di Kota Bandung. Menurut Abdullah dan Fikri (2018), Priyambodo (2018) menyatakan bahwa kecenderungan jumlah kendaraan yang selalu meningkat setiap tahun tersebut ternyata peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan

panjang jalan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya berpengaruh pada kualitas kepadatan lalu lintas yang dari tahun ke tahun semakin bertambah parah.

Menurut Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2020, data rasio kendaraan pribadi di Kota Bandung mencapai 96,59%, sedangkan rasio kendaraan umum hanya 3,4%. Sementara itu pengguna kendaraan pribadi 81,75% dan pengguna umum 18,25%. Sedangkan pada tahun 2022 pengguna kendaraan pribadi yaitu 78,515% dan pengguna transportasi umum yaitu 21,485%. Jika dilihat dari data Kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2017-2021 diketahui bahwa jumlah angkutan umum di Kota Bandung mengalami penyusutan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Dari 15.139 unit angkutan umum pada tahun

2017, jumlahnya berkurang menjadi 14.178 unit pada tahun 2018, 13.610 unit pada tahun 2019 hingga 12.514 unit pada tahun 2020.

Safitri (2015) menegaskan bahwa untuk menanggulangi masalah kemacetan yang diakibatkan pergerakan, dan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi, diperlukan sarana angkutan umum yang mampu untuk mengakomodasi hal tersebut. Angkutan umum dapat menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah kemacetan dan mobilitas penduduk yang tinggi. Angkutan umum sebagai salah satu moda transportasi darat memiliki kelebihan, yaitu efisien dan ekonomis karena mampu mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak pada satu waktu bersama.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi kemacetan dengan mengembangkan pelayanan dibidang transportasi publik dengan menyediakan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM). Hal tersebut sejalan dengan amanat undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan tanggung jawab negara atas lalu lintas dan penyediaan angkutan umum massal sebagai prioritas pembangunan dan pengembangan transportasi. Di kota Bandung, SAUM yang disediakan pemerintah kebijakan ini dikembangkan melalui pengembangan Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan, Bus Rapid Transportation (BRT), penyelenggaraan BRT tersebut salah satunya bernama Trans Metro

Bandung (TMB). Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan surat kebijakan tentang pengoperasian Trans Metro Bandung (TMB) yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 551.2/Kep.646-Huk/2006.

Gunadayani (2015) menambahkan, angkutan umum merupakan sarana transportasi publik yang memiliki kelebihan dan manfaat besar dibandingkan kendaraan pribadi. Penggunaan transportasi publik jauh lebih efisien dalam hal penggunaan ruang dibandingkan kendaraan umum. Jika semakin banyak masyarakat menggunakan angkutan umum, maka akan semakin efektif penggunaan jalan raya.

Menurut Susantono (2014:68), masalah kemacetan hanya dapat dipecahkan dengan beralihnya

masyarakat menggunakan kendaraan umum. Jika semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan umum, maka akan semakin efektif pula penggunaan jalan raya. Dengan kata lain, kendaraan umum merupakan solusi utama dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas. Oleh karenanya kebijakan pengembangan angkutan umum harus diarahkan kepada pembangunan transportasi public berbasis massal yang aman, cepat nyaman dan terjangkau oleh daya beli seluruh kelompok masyarakat.

Penyelenggaraan angkutan umum (massal) diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dimana setiap pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya pelayanan angkutan umum di setiap wilayahnya masing-masing.

Peraturan tentang angkutan jalan dimana setiap pemerintah daerahnya masing-masing wajib menjamin tersedianya pelayanan angkutan umum pada setiap wilayahnya. Di Kota Bandung sendiri sudah ada beberapa moda transportasi massal yang melayani pergerakan lokal dalam kota, seperti mobil angkutan umum yang dikenal dengan sebutan angkot ataupun moda angkutan umum berbentuk bis seperti TMB (Trans Metro Bandung) dan Perum Damri (Perusahaan Umum Djawatan Angkutan Umum Republik Indonesia).

Pengelolaan transportasi umum tentu saja memiliki kaitan dengan ilmu administrasi publik, dalam kepentingan public sebagai tujuan dari kegiatan administrasi Negara/publik. Pengelolaan transportasi umum adalah

kepentingan sebagian masyarakat pengguna transportasi umum terutama di jalan Asia-Afrika. Kepentingan yang seharusnya diperjuangkan oleh para administrator publik adalah kepentingan publik. Kepentingan publik sering dikompertisikan dengan kepentingan-kepentingan lain dan dalam banyak kesempatan dikorbankan. Hal ini dapat dilihat dalam pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, dimana dikerjakan, yang sering kali tidak sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan transportasi umum di Jalan Asia-Afrika Bandung, pemerintah sebagai administrator yang memberikan fasilitas dan mengerjakan berbagai program yang telah direncanakan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya pengemudi transportasi umum di Jalan Asia-Afrika. Bagaimana Pemerintah Kota Bandung mengelolah transportasi umum di Jalan Asia-Afrika, sehingga transportasi umum menjadi lebih teratur dan juga masalah lalu lintas dan tata ruang dapat teratasi dengan baik.

Dinas Perhubungan Kota Bandung saat ini sedang menjalankan program-program untuk mengelola kemacetan di jalan Asia Afrika. Diantaranya mengoptimalkan penggunaan bus sebagai sarana transportasi umum. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan pengelolaan transportasi umum melalui regulasi dan manajemen lalu lintas, penyediaan fasilitas dan infrastruktur transportasi. Dinas Perhubungan Kota Bandung sedang

berupaya meningkatkan minat masyarakat pada transportasi umum guna menanggulangi kemacetan di Kota Bandung khususnya pada jalan-jalan utama salah satunya di jalan Asia Afrika.

Sehubungan dengan adanya masalah-masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang program-program maupun solusi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung mengenai pengelolaan transportasi umum pada kemacetan yang terjadi di jalan Asia Afrika.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Administrasi Publik

Kata administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa inggris "*public administration*" yang sering disebut sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan, Indradi (2006:110).

Menurut Chandler (1998) dalam Indradi (2006:114) dijelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Barton dan Chapel, menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai "the work of Government" (Indradi, 2006:116).

Menurut Starling, menjelaskan bahwa administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintah yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan (Indradi, 2006:116).

Menurut Rosenbloom menjelaskan administrasi publik yaitu "*is the use of*

managerial, legal and political". Merupakan pemanfaatan

teori-teori dan proses-proses manajemen,

politik dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat

secara keseluruhan atau sebagian (Indradi, 2006:116).

Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama untuk memformulasikan dan menjalankan

suatu kebijakan untuk mencapai tujuan, baik untuk kepentingan pemerintah ataupun kepentingan publik.

Administrasi publik memiliki ruang lingkup yang secara implisit berhubungan dengan tata

pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh Syafi'i (2006:27)

Cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Pasolong (2008:21) mengemukakan ada delapan ruang lingkup administrasi publik yaitu, "kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja dan etika administrasi publik".

Menurut pendapat Henry sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2008:19) menyebutkan ruang lingkup administrasi publik terdiri dari :

- a. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi
- b. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia
- c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan etika birokrasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi publik meliputi organisasi publik, kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja, dan etika administrasi publik, ruang lingkup administrasi publik di bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan, dan ruang lingkup administrasi publik di bidang kekuasaan.

2.2 Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan

sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur.

Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

2.3 Transportasi

Transportasi adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat yang lainnya atau dari tempat asal ke tempat

tujuan dengan menggunakan wahana digerakan manusia, hewan atau mesin. Zulfikar (2010). Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Fungsi transportasi ini tidak hanya dilihat secara perorangan tapi juga dilihat dari kepentingan masyarakat luas.

- a) Penggerak pembangunan, sebuah daerah terpencil dengan hasil ekonomi dari sumber daya alam apabila tidak terdapat lalu lintas dan angkutan ke daerah tersebut maka akan terpercillah daerah tersebut, karena itu apabila ada angkutan maka daerah tersebut dapat digerakan pembangunannya.
- b) Melayani kegiatan nyata pada ekonomi yang sudah berjalan maka transportasi diperlukan untuk menunjang pergerakan barang atau orang dari satu tempat ke tempat

yang lain. Zulfikar (2010).

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan jika transportasi merupakan sebuah pergerakan atau mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan angkutan. Fungsi dari transportasi itu sendiri dapat menggerakkan roda ekonomi dari satu daerah yang telah ada transportasi karena kegiatan masyarakat di daerah tersebut sudah lebih berkembang dari daerah yang tidak atau belum ada sistem lalu lintas.

Dalam kegiatan transportasi tentu banyak faktor pendukung untuk melaksanakan sistem transportasi yang baik. Jika suatu transportasi tidak diatur dengan baik maka bisa jadi menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas atau ruang publik yang semrawut karena tidak terlaksananya transportasi yang baik.

Maka faktor yang mendukung transportasi yang baik antara lain :

- a) Rute (jaringan) yang terdiri dari asal, tujuan dan lintasannya.
- b) Prasarana (infrastruktur) sesuai dengan transportasi yang digunakan.
- c) Sarana alat untuk melakukan perpindahan
- d) Operasional proses pengaturan operasi kendaraan agar dapat seefisien mungkin.
- e) Peraturan pelaksanaan yang mengatur penggunaan prasarana oleh sarana karena banyak pemakaian pada saat yang bersamaan pada satu tempat atau ruang.
- f) Pengawasan: agar pemakaian prasarana berjalan tertib sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan.
- g) Pelaksanaan (pengusaha angkutan/badan penyelenggara): pihak yang menyediakan sarana untuk pelaksanaan perpindahan yang biasanya disebut pengusaha angkutan umum.

- h) Penumpang (konsumen): yang memerlukan alat angkut untuk memudahkan perpindahannya dan agar lebih cepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- i) Pihak yang terkena dampak angkutan (lingkungan): pihak yang dapat mengganggu atau terganggu dalam proses pergerakan atau pengoperasian sarana. Sani,Zulfikar (2010;12).

Dengan demikian apabila satu unsur ini tidak benar maka sistem tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan

2.4 Konsep Manajemen

Manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas dalam organisasi berupaperencanaan,pengorganisasian , pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*”

yang berarti menangani, memimpin, membimbing atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjejang, berkelanjutan dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih tetapkan (Sri Wahyuni Idris 2016).

Pengertian Manajemen

banyak ditemukan dalam beberapa literatur diantaranya manajemen sebagai suatu proses kerjasama, manajemen sebagai kumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas dan manajemen sebagai suatu seni dan suatu ilmu pengetahuan (Effendi, 2014). Secara praktik manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pencapaian

tujuan yang dilakukan oleh manajemen puncak melalui kegiatan orang lain.

Definisi manajemen berdasarkan optimasi, koordinasi dan integrasi sumber daya yang menekan pada koordinasi dan integrasi kegiatan kerja atau kerjasama pelaksanaan tugas-tugas yang dikemukakan oleh masing-masing ahli diantaranya :

Effendi (2014) manajemen adalah mengkoordinasikan kegiatan kerja sehingga diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang.

Sesuai dengan Kreitner (2010) manajemen merupakan proses kerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah, kelompok kedua menekankan manajemen sebagai proses dari

fungsi-fungsi agar efektif dalam melaksanakan tugas-tugas dan efisien menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasibuan (2005) manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Manajemen menurut Torang (2013) adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Selain itu Sukarna (2011) menyatakan manajemen yaitu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik.

2.5 Fungsi-Fungsi Manajemen

Dalam perkembangan ilmu manajemen pada ahli telah

mengemukakan masing-masing pendapatnya tentang fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Berikut ini beberapa fungsi pengelolaan yang telah dikemukakan oleh Sukarna (2011) terdapat 4 fungsi pengelolaan yang akrab dikenal dengan POAC yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.

George R. Terry (2010) dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

1) *Planning* (Perencanaan)

Planning yaitu perencanaan pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuat dan penggunaan

perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2) *Organizing*

(Pengorganisasian)

Organizing

merupakan penentuan, pengelompokkan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Penggerakan

/pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan

mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning, organizing, actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian kontrol mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Luther M. Gullick

Mendefinisikan Manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha sistimatis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih manfaat bagi kemanusiaan.

a) *Planning* (Perencanaan)

Proses menetapkan secara garis besar apa yang

perlu dilakukan dan metode yang digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang ditetapkan bagi organisasi. Perencanaan juga sebuah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Siagian (2003) menjelaskan bahwa perencanaan atau *planning* dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara mata tentang hal-hal yang akan telah ditentukan.

Perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Penjelasan tersebut memiliki maksud bahwa perencanaan merupakan proses pemikiran yang matang dan pengambilan keputusan mengenai hal apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

b) *Organizing*

(Pengorganisasian)

Harsuki (2013) menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya.

Siagian (2003) menjelaskan juga bahwa pengorganisasian adalah

keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

c) *Staffing* (Pengadaan Tenaga Kerja)

Kegiatan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang melakukan seluruh pekerjaan sesuai bidang dan keahliannya masing-masing dalam organisasi tersebut secara merekrut dan mempekerjakan personalia untuk melaksanakan pekerjaan agen yang penting. Bila *organizing* menyusun wadah yang legal tempat menampung segala kegiatan ama *staffing* berhubungan dengan penentuan tenaga-tenaga pelaksanaannya. Dengan kata lain menentukan fungsi personil keseluruhan akan menduduki tiap posisi serta memelihara kondisi yang favorabel.

d) *Directing* (Pemberian Bimbingan)

Directing yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha

bimbingan, memberikan *guidance*, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai. Selain itu *directing* adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan *guidance*, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi, agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.

e) *Coordinating*

(Pengkoordinasian)

Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization*) dari usaha-usaha (*efforts*) untuk mencapai pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*) dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objective*). Selain itu pengkoordinasian yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha menyatukan dan mengarahkan kegiatan dari seluruh anggota organisasi agar dalam setiap gerak dan langkahnya tertuju pada tujuan. Dengan kata lain adanya interelasi dari berbagai corak kerja.

f) *Reporting* (Pelaporan)

Pelaporan adalah kegiatan berhubungan dengan laporan dari setiap kejadian, lancar tidaknya aktivitas, apakah ada kemajuan atau tidak, ini kebalikan dari *directing* yang datang dari atasan kebawah sedang ini dari bawah keatas. Disini terjadi *two-way traffic* kegiatan eksekutif menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi kepada alasanya, termasuk menjaga agar dirinya dan bawahanya tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian dan inspeksi.

g) *Budgeting* (Penganggaran)

Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akutansi. Ada tiga tujuan anggaran yaitu pengawasan, manajemen dan perencanaan. Sedangkan fungsi anggaran berdasarkan perjalannya terdiri dari empat macam yaitu ; fungsi kontrol, fungsi manajemen, fungsi perencanaan dan fungsi evaluasi. Penyusunan anggaran yaitu bagaimana uang itu digunakan, untuk keperluan apa, berapa banyaknya, termasuk pada pos mana, kemudian dari sumber-sumber apa saja keuangan didapatkan. Bila

terjadi *deficit* darimana kekurangan akan ditutup.

Berbagai Penjelasan yang menjadi klarifikasi dari berbagai sumber hampir serupa, namun ketika membahas tentang hubungan yang terjadi disaat perkembangan POAC menuju POSDCORB akan ada beberapa perspektif, namun dalam hal ini akan mengambil salah satu dari berbagai pendapat tersebut untuk menjadi panduan dalam analisis.

Buku Dasar-dasar Manajemen Umum karya Wursanto (1988) menyimpulkan bahwa PO atau *planning* dan *organizing* dalam semua teori adalah sama arti dan tiada perbedaan.

Hanya saja pada saat di POSDCORB akan ada tambahan untuk *planning* yaitu *budgeting*, untuk masalah ini dapat dilihat dari kedua kata tersebut dimana *planning*

memiliki arti perencanaan untuk mencapai tujuan dan *budgeting* memiliki makna sebagai penganggaran yang sangat berhubungan dengan rencana kerja atau program apa saja yang akan dilaksanakan sehingga perlu perhitungan cermat untuk menjalani sebuah rencana dalam bentuk optimalisasi penggunaan dana, *planning* dalam POSDCORB telah dengan jelas dipisahkan menjadi dua, sehingga yang dalam POAC perencanaan itu termasuk di dalamnya penganggaran dan penganggaran. Maksud dan tujuan dari hal tersebut tak lain sebagai bentuk perubahan lebih baik untuk menjalani sebuah organisasi, namun terkadang pada praktiknya tak sedikit organisasi dalam memutuskan penganggaran juga langsung dibahas dalam perencanaan program kerja,

sehingga tanpa perbedaan antara perencanaan dan penganggaran, hal tersebut mengikat juga berbagai bentuk faktor pendukung untuk spesialisasi atau hanya perlu sekali jalan bisa menyelesaikan dua tugas.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menggambarkan kondisi transportasi umum serta manajemen yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kota Bandung khususnya di jalan Asia Afrika. Menurut Juliansyah (2011) penelitian kualitatif adalah kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau

frekuensinya. Sehingga pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan yang melalui suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan ini penelitian menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis, akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan variable secara lepas, tidak menghubungkan antara variable yang satu dengan variable yang satunya secara sistematis, oleh

karena itu metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

4. Proposisi Penelitian

Proposisi diartikan sebagai jawaban atas suatu permasalahan.

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dijelaskan oleh penulis, maka dapat diketahui oleh penulis, maka dapat diketahui proposisi dari rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana fungsi manajemen pengelolaan transportasi umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung pada kemacetan di jalan Asia Afrika
2. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap kemacetan di jalan Asia Afrika menurut Teori Indikator Manajemen Pengelolaan

3. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam upaya melaksanakan pengelolaan transportasi umum pada kemacetan di jalan Asia Afrika di Kota Bandung

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Transportasi Umum di Jalan Asia-Afrika oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung kesimpulan yang penulis dapatkan adalah :

1. Dinas yang terkait dalam pengelolaan transportasi umum di jalan Asia-Afrika Bandung adalah Dinas Perhubungan, yang bekerjasama dengan Organda dan Pemerintah. Masing-masing Dinas memiliki perannya sendiri dalam pengelolaan transportasi

umum di jalan Asia-Afrika adapun peran dinas Perhubungan adalah sebagai Pihak yang membuat regulasi ataupun peraturan transportasi umum di Jalan Asia-Afrika, Organda penyedia fasilitas transportasi umum adalah sebagai pelaksana dari masing-masing program yang bekerjasama dengan Dishub seperti pemeliharaan kendaraan, ketertiban dan juga sarana prasarana yang bersinggungan langsung dengan supir angkutan umum itu sendiri.

2. Hambatan yang di hadapi oleh dinas Perhubungan adalah Masalah ekonomi merupakan hambatan yang sangat mendasar terkait pengelolaan transportasi umum di jalan Asia-Afrika Bandung Hal ini di sebabkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum

untuk mencari nafkah di sepanjang jalan Asia-Afrika. Juga para supir transportasi umum yang kejar setoran sehingga tidak mematuhi peraturan atau rambu berlalulintas. Permasalahan juga terkait dengan kondisi sosial dan geografis di Jalan Asia-Afrika Bandung itu sendiri.

3. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengelolaan transportasi umum di jalan Asia-Afrika. Mengoptimalkan ruang yang ada dengan tidak mengabaikan hambatan yang ada. Dengan ruang milik jalan yang sangat terbatas di jalan Asia-Afrika. dikembangkan dengan melakukan berbagai pembangunan yang dapat memanfaatkan lahan yang tersedia. Serta penyediaan fasilitas dan peraturan.

6. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada judul Pengelolaan Transportasi umum di jalan Asia-Afrika oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Perhubungan memberikan jadwal yang pasti pada setiap keberangkatan transportasi umum agar pengguna transportasi umum juga dapat menghemat waktu dan menjadi transportasi yang efektif dan efisien.
2. Memperbaiki fasilitas transportasi umum agar lebih nyaman, dan aman.
3. Aktif berkomunikasi dengan Organda perihal penyediaan fasilitas dan perawatannya, serta peraturan untuk para supir angkutan umum itu sendiri.

4. Sebaiknya Dinas Perhubungan memberikan sanksi yang tegas pada pelanggaran dalam transportasi umum, pelanggaran rambu-rambu lalulintas serta fasilitas transportasi umum yang sudah tidak memadai harus segera di perbaiki agar tidak membahayakan pengguna transportasi umum serta pengendara lain.
5. Sebaiknya Dinas perhubungan dapat memaksimalkan fungsi dari halte agar kegiatan berlalulintas dapat berjalan dengan lebih baik dan tidak menimbulkan kemacetan.

6. Sebaiknya Dinas Perhubungan aktif memberi edukasi kepada supir transportasi umum melalui Organda juga kepada masyarakat agar penggunaan transportasi umum dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi solusi bertransportasi bagi masyarakat.

